

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KAMPAR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



NADYA ZILLIA FITRI

165110343

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENGELUARAN PEMERINTAH
DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

NADYA ZILLIA FITRI
NPM : 165110343

(Dibawah Bimbingan : Hj. Nawarti Bustamam, SE, M.Si)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan output yang semakin lama semakin besar dan untuk mengetahuinya harus membandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ketahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kampar. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan data rentang waktu 10 tahun mulai dari 2009 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan hasil, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja

ABSTRACT

ANALISIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE GROWTH
AND LABOR GROWTH ON ECONOMIC GROWTH IN KAMPAR DISTRICT

By

NADYA ZILLIA FITRI

NPM : 165110343

(Under the guidance : Hj. Nawarti Bustamam, SE, M.Si)

Economic growth is a process of increasing productive capacity in an economy continuously over time so as to produce an increasingly large level of output income from year to year. The purpose of this research is to see how much influence the government and labor have on the rate of economic growth in Kampar regency. The research method uses multiple regression analysis using data spanning 10 years from 2009 to 2018. Based on the results of the research, the results show that government spending has a positive and significant effect on the rate of economic growth in Kampar district. Meanwhile, labor has no positive and significant effect on the rate of economic growth in Kampar district.

Key words : Economic growth rate, government expenditure and labor.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berpikir terhadap alam dan lingkungannya serta dengan perantara kalam, berkat inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Dan pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kampar” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habbina wanabiyyana Muhammad SAW tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, Aamiin...

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat bimbingan, pengaruh serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disamping bantuan lain dari berbagai pihak yang juga sangat bermakna.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih banyak kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada:

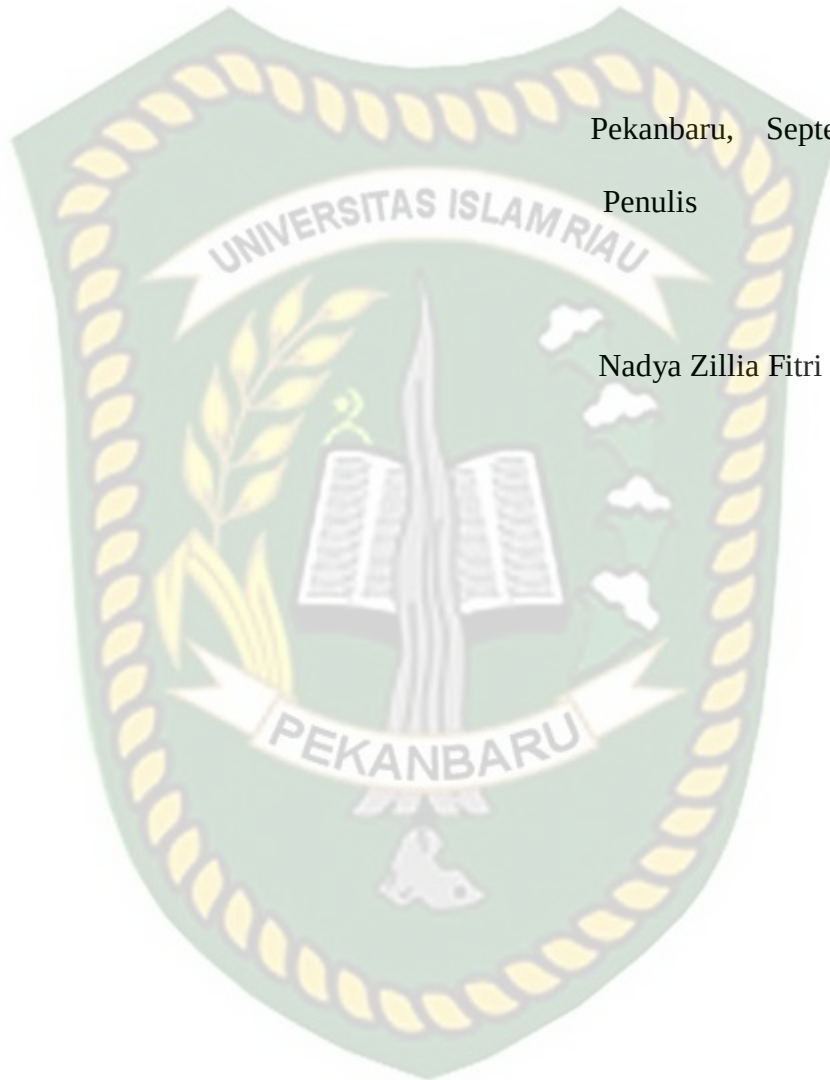
1. Bapak Drs. Abrar, M.si., AK, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. M. Nur M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Nawarti Bustamam, SE., M.Si selaku pembimbing penulis
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi Khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Khususnya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayah dan ibunda yang telah memberikan semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam bangku pendidikan.
7. Orang yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis yaitu adik kandung penulis Tasya Kamila fitri dan Ahmad Athar Anugerah Fitri.
8. Orang yang telah banyak memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis yaitu : Aribowo, Mirawati, Fitria Isramelda, Lenny Noviara, Rahmawati, Sri Indriyani., serta teman-teman lainnya.

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Pekanbaru, September 2020

Penulis

Nadya Zillia Fitri



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah	9
1.3 : Tujuan Penelitian.....	10
1.4 : Manfaat Penelitian.....	10
1.5 : Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 : Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 : Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	13
2.2 : Hubungan Antar Variabel.....	17
2.2.1 : Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	17
2.2.2 : Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.3 : Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 : Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 : Lokasi Penelitian	24
3.2 : Jenis Dan Sumber Data	24

3.3 : Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 : Definisi Variabel Penelitian.....	25
3.5 : Metode Analisis Data	26

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 : Keadaan Geografis Kabupaten Kampar	30
4.2 : Pemerintahan	31
4.3 : Penduduk	33
4.4 : Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	34
4.5 : Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	36
4.5.1 : Visi.....	36
4.5.2 : Misi	37
4.6 : Perekonomian	37

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 :Hasil Penelitian.....	40
5.1.1 : Perkembangan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar.....	40
5.1.2 : Pertumbuhan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	41
5.1.3 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar ..	43
5.2: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kampar	46
5.2.1 : Interpretasi Hasil	47
5.3 : Uji Statistik.....	48

5.4 : Uji Asumsi Klasik	50
5.5 : Pembahasan	54
5.5.1 : Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	54
5.5.2 : Tenaga Kerja Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	55
BAB VI : PENUTUP	
6.1 : Kesimpulan.....	57
6.2 : Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018	5
Tabel 1.2 : Jumlah Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	7
Tabel 1.3 : Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	8
Tabel 2.1 : Daftar Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kampar, 2009-2018..	32
Tabel 4.2 : Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018	38
Tabel 5.1 : Perkembangan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	40
Tabel 5.2 : Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018	42
Tabel 5.3 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu perkembangan aktivitas pada perekonomian yang mengakibatkan barang serta jasa yang diproduksi pada masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun kemampuan suatu negara dalam memperoleh barang serta jasa akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah serta kualitasnya. Investasi menambah modal, teknologi yang dipergunakan akan berkembang serta sumber daya manusia menjadi meningkat sebagai dampak perkembangan penduduk.

Dalam suatu Negara maupun daerah hal yang sangat diinginkan yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan yang mana terjadinya peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) pada suatu negara, seperti peningkatan income perkapita serta peningkatan fasilitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif serta negatif. apabila dalam suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, maka aktivitas ekonomi pada periode tersebut terjadi peningkatan, serta begitu pula sebaliknya. Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan fiskal produksi barang serta jasa yang berlaku pada suatu Negara, seperti pertambahan serta jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa serta pertambahan produksi barang modal. Dalam

memberikan suatu gambaran kasar tentang pertumbuhan ekonomi yang diperoleh suatu Negara, ukuran yang selalu digunakan yaitu tingkat pertumbuhan income nasional rill yang dicapai.

Tujuan pembangunan nasional ialah untuk meningkatkan suatu hasil kerja pada perekonomian agar bisa menghasilkan lapangan pekerjaan dan bisa memberikan kehidupan yang layak sebagaimana dari tujuan awal didirikannya Negara tersebut untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perencanaan ialah suatu aktivitas yang ditentukan sebelumnya untuk dilakukan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Alder (dalam Rustiadi, 2008) Perencanaan adalah suatu prosedur dalam menentukan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang dan menetapkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapainya. Salah satu peran perencanaan ialah suatu arahan pada prosedur pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, disamping itu juga sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses pembangunan yang diinginkan.

Jadi tujuan dari pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan income pada nasional rill juga meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah pada bidang kerja yang dapat banyak menyerap sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi penting bagi suatu negara untuk menjauhi kesenjangan sosial penduduknya yang juga tidak terlepas pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses dalam meningkatkan penghasilan total serta perkapita melalui perhitungan pertambahan penduduk pada negara dengan disertai transisi fundamental terhadap struktur ekonomi negara serta pemerataan penghasilan

penduduknya. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kemampuan yang lebih besar pada masyarakatnya dalam menguasai alam yang ada disekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.

Pengesahan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah setempat dalam memerintah serta melaksanakan pekerjaan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Republik Indonesia serta pemberlakuan undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat serta pemerintah daerah, yang diharapkan bisa memberikan motivasi peningkatan kreativitas serta pengembangan potensi yang ada pada setiap wilayah. Menurut Jhingan (2004) pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan secara terus menerus pada produk perkapita atau perpekerja, seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk dan biasanya dengan transisi struktural.

Pada negara berkembang termasuk Indonesia, lajunya arus kapital memiliki peluang yang sangat baik dalam memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan usaha terus-menerus yang diinginkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga bisa memperoleh tujuan tersebut, maka pembangunan nasional di fokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk kebutuhan dana pembangunan ekonomi itu sangatlah besar. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara investasi. Investasi adalah penanaman

modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertentu. Tujuan investasi yaitu untuk memperoleh profit atau laba.

Salah satu indikator keberhasilan pada pelaksanaan pembangunan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur makro ialah dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, meskipun sudah digunakan pada indikator pembangunan pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum serta belum menggambarkan kemampuan masyarakat secara individual. Dalam pembangunan wilayah bisa diharapkan memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan kapasitas pada jangka panjang dari negara yang bersangkutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan adanya kemajuan atau penyesuaian teknologis, kelembagaan serta ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Definisi tersebut mempunyai tiga komponen : *pertama*, pertumbuhan ekonomi bangsa dapat dilihat dari barang serta jasa mengalami peningkatan. *Kedua*, teknologi maju ialah faktor dalam menentukan derajat pertumbuhan kemampuan untuk menyediakan aneka macam barang pada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas serta efisien memerlukan adanya penyesuaian bidang kelembagaan serta ideologi sehingga inovasi yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2007). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2009	2,56
2010	3,54
2011	3,25
2012	6,16
2013	4,52
2014	3,42
2015	2,41
2016	2,03
2017	4,98
2018	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi. Yang mana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar pada tahun 2009 sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar mengalami penurunan sebesar 3,25 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurun sebesar 4,52 persen. Pada tahun 2014-2016 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 3,42-2,03 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar mengalami peningkatan kembali sebesar 4,98

persen. Dan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 3,09 persen.

Untuk menciptakan suatu perekonomian yang bisa berkembang di Kabupaten Kampar maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kampar harus bisa menggunakan seluruh dana yang ada untuk pembangunan ekonomi. Menurut Irawan (2002) pembangunan ekonomi ialah berbagai upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan taraf hidup negara yang diukur dengan tinggi rendahnya penghasilan riil perkapita. Dalam hal ini pembangunan wilayah kabupaten Kampar diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan kemampuan daerah tersebut dalam menyerap sumber daya manusia lokal untuk kepentingan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja ialah jumlah seluruh penduduk pada suatu negara dalam memproduksi barang serta jasa ketika ada permintaan terhadap sumber daya manusia mereka, serta ketika mereka mau ikut serta pada aktivitas tersebut. Tenaga kerja ialah penduduk yang bekerja pada usia kerja berkisar 15 – 64 (Suparmoko, 2002). Menurut Simon Kuznet (dalam Jhingan tahun 2000) pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan jangka panjang pada kemampuan suatu Negara dalam menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, serta penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang dibutuhkan. Dalam menggerakkan penghasilan wilayah, pemerintah Kabupaten Kampar wajib memanfaatkan dana yang ada berasal dari anggaran penghasilan serta pengeluaran pemerintah dengan seoptimal mungkin. Belanja pemerintah

ialah suatu perilaku pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pendapatan serta pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Menurut Mursyidi (2013) pengeluaran pemerintah ialah belanja anggaran untuk perolehan aktiva tetap serta aktiva lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dalam membeli barang serta jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Tabel 1.2 : Jumlah Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018 (Persen).

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2009	94,31
2010	94,50
2011	94,54
2012	98,44
2013	92,56
2014	90,80
2015	90,60
2016	92,57
2017	94,54
2018	94,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan dari tabel 1.2 bahwa dapat dilihat pada tahun 2009-2012 pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan 94,31-98,44%. Pada tahun 2013-2015 pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami penurunan 92,56-90,60%. Sedangkan pada tahun 2016-2017

pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan kembali dari 92,57-94,54%. Dan pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 94,35%.

Untuk meningkatkan penghasilan di Kabupaten Kampar dibutuhkan partisipasi sumber daya manusia lokal sebagai kapital dalam membangun wilayah. Tenaga kerja ialah penduduk yang usia kerja siap dalam melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan serta yang mengurus rumah tangga (Yoga Firdaus, 2007).

Tabel 1.3 : Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018 (Persen)

Tahun	Tenaga Kerja
2009	61,82
2010	60,30
2011	62,25
2012	60,46
2013	63,63
2014	62,78
2015	61,44
2016	60,34
2017	61,16
2018	60,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 banyaknya tenaga kerja di kabupaten Kampar sebesar 61,82 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 60,30 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten

kampar mengalami peningkatan sebesar 62,25 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 60,46 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 63,63 persen. Pada tahun 2014-2016 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 62,78-60,34 persen. Dan pada tahun 2017 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami peningkatan kembali sebesar 61,16 persen. Dan pada tahun 2018 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 60,45 persen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kampar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas bisa dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Agar mengetahui pengaruh pertumbuhan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten kampar.
2. Agar mengetahui pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuaten Kampar.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang antara lain yaitu:

1. Memberikan bahan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait pada penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar sehingga dapat digunakan sebagai program pembangunan yang lebih baik lagi.
2. Menjadi tambahan referensi, bahan serta pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya yang menyangkut penelitian yang sama.
3. Sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pembahasan tersebut dapat di bahas secara rinci maka penulis membaginya ke dalam enam bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab tersebut menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Pada bab tersebut menjelaskan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang akan di bahas yang telah diterangkan dalam tinjauan pustaka serta hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tersebut menjelaskan tentang metode penelitian yang bersangkutan dengan lokasi penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab tersebut menjelaskan tentang gambaran umum yang bersangkutan dengan letak geografis, iklim serta kependudukan.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang telah dijelaskan tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab tersebut berisikan kesimpulan serta saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan sepanjang waktu sehingga memperoleh tingkat penghasilan output yang semakin lama semakin besar serta untuk mengetahuinya harus meratiokan dengan tingkat penghasilan nasional dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan ekonomi pada suatu Negara atau daerah yang disertai transisi dari keadaan tetap ke keadaan yang dinamis dengan didukung pertambahan jumlah angkatan kerja serta sarana prasarana produksi, kemampuan menyerap sumber daya manusia serta perhitungan pertambahan, kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan dalam kegiatan ekonomi tradisional (Husain At-Tariqi, 2004).

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan barang perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari tiga aspek, yaitu : proses, barang perkapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi “proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan wilayah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung dalam suatu wilayah, benar dengan potensi serta prioritas wilayah tersebut. Pada keseluruhan pembangunan, wilayah juga benar

merupakan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional.

Terdapat 4 aspek yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. 1). Tenaga kerja, yaitu suatu keberhasilan ekonomi dilihat dari kualitas input tenaga kerjanya atau SDM nya. Hampir semua aspek produksi yang lainnya seperti : barang modal, bahan mentah serta teknologi, dapat dibeli atau dipinjam dari daerah lain. Namun, dalam menerapkan teknik produktivitas yang tinggi atas kondisi lokal hampir semuanya menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, serta keahlian yang hanya bisa diperoleh dari angkatan kerja terampil yang terdidik. 2). Sumber daya alam dengan faktor produksinya ialah tanah. Faktor yang paling berharga adalah tanah yang dapat ditanami. Selain tanah, sumber daya alam yang sangat penting adalah : air, hutan, migas serta bahan mineral lainnya. 3). Akumulasi kapital. Dalam akumulasi modal, dibutuhkan pengorbanan yang berupa pengurangan konsumsi, yang akan terlaksana selama beberapa puluh tahunan. Akumulasi modal serta investasi ini sangat diperlukan dalam memajukan bidang ekonomi. 4). Transfigurasi teknologi serta inovasi. Salah satu kunci pembangunan ekonomi ialah memicu semangat kewirausahaan. Suatu perekonomian akan sulit maju apabila tidak mempunyai para wiraswastawan yang siap menanggung resiko usaha dalam membangun pabrik produksi, hingga mengimpor berbagai cara serta teknik usaha yang lebih maju.

Ada kecenderungan atau bisa dilihat sebagai hipotesa bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun maka semakin cepat pula perubahan struktur ekonomi, dengan anggapan yaitu aspek-aspek penentu lain

mendukung sistem tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku serta teknologi tersedia (Tambunan, 2001).

Pembangunan wilayah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah tidak semakin meluas, tujuan dari pembangunan yang sedang berlangsung mencakup sasaran seperti : 1). Untuk meratakan pembangunan diseluruh wilayah, sekaligus dalam menghindari jurang perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah yang semakin dalam. 2). Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah yang saling memberi laba agar terjalin ikatan (ekonomi) antar wilayah yang kuat dalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. 3). Suatu pengarahan pada aktivitas pembanguna wilayah sesuai dengan kemampuan aspirasi serta potensi yang ada di wilayah.

Salah satu indikator yang paling penting untuk menganalisa pembangunan ekonomi disuatu negara ialah pertumbuhan ekonomi. “pertumbuhan” tidak identik dengan “pembangunan”. Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu syarat dari banyak syarat yang sangat dibutuhkan pada proses pembangunan.

Terdapat tiga tujuan penting untuk pembangunan wilayah, yaitu mencapai pertumbuhan, pemerataan serta berkelanjutan. Tujuan pembanguna yang pertama ialah pada pertumbuhan ditentukan sampai mana kelangkaan sumber daya yang meliputi atas tenaga kerja, peralatan serta sumber daya alam bisa digunakan serta diaplikasikan secara maksimal untuk meningkatkan suatu aktivitas produktif.

Semakin tinggi tingkat keterampilan tenaga kerjanya, maka besar dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia yang berguna untuk mencapai

pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, ialah pemerataan yang mempunyai implikasi. Untuk pencapaian tujuan yang ketiga, sumber daya bisa berkelanjutan maka tidak boleh hanya fokus pada satu wilayah saja sehingga manfaat yang dihasilkan dari pertumbuhan bisa dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan wilayah harus bisa mematuhi syarat bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak boleh melebihi kapasitas kemampuan produksi.

Menurut Jhingan (2004) Pertumbuhan ekonomi ialah suatu peningkatan terus menerus pada output perkapita atau perpekerja, sering kali diikuti peningkatan jumlah penduduk dan biasanya dengan transisi struktural. Ada kecenderungan yang bisa dilihat sebagai hipotesa bahwa semakin laju pertumbuhan ekonomi maka semakin pula transisi struktur ekonomi, dengan anggapan bahwa faktor penentu lainnya mendukung proses tersebut, seperti sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu peningkatan output perkapita pada jangka panjang penekanannya ialah pada tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu Negara. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut bisa terjadi sebagai dampak dari penentu endogen maupun eksogen, baik faktor yang terdapat

didalam wilayah yang bersangkutan maupun faktor diluar wilayah atau gabungan dari keduanya. Suatu pendekatan yang lazim dibutuhkan untuk menjelaskan penentuan internasional dari pertumbuhan regional yaitu melalui penggunaan model ekonomi makro. Model tersebut berorientasi pada segi penawaran serta menjelaskan output menurut faktor regional tertentu yang masing bisa dianalisis secara individual. Apabila dirumuskan menurut faktor yang lebih penting serta lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan yang mencerminkan hubungan input output ialah menggunakan fungsi produksi cobb douglas.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pertumbuhan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2000) Belanja pemerintah ialah suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pendapatan serta belanja pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin pada dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada wilayah atau regional. Pengeluaran pemerintah ialah belanja anggaran dalam memperoleh aktiva tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu tahun (Rasdianto, 2013).

Menurut Nodiawan (2006) belanja pemerintahan ialah belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghasilkan asset tertentu. Ada tiga cara untuk menghasilkan aktiva tetap pemerintah wilayah ialah membangun sendiri serta menukarkan dengan aktiva tetap lainnya serta juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membeli. Belanja pemerintah

mempunyai karakteristik yang spesifik serta menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja pada umumnya hanya dapat digunakan disektor publik, tidak disektor bisnis. Belanja disektor publik mencakupi dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan hubungan dengan kegiatan pengeluaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung serta biaya tidak langsung. Pembagian ini berdasarkan PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Klasifikasi pengeluaran diperbaiki serta dikelompokan menjadi belanja langsung serta tidak langsung. Belanja langsung ialah pengeluaran yang terkait langsung pada program serta aktivitasnya. Suatu aktivitas tidak akan berjalan tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung ialah pengeluaran yang tidak terkait langsung pada program serta aktivitasnya.

Pengeluaran pemerintah ialaha sebagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya suatu perekonomian dengan cara menentukan besarnya penghasilan nasional serta APBD pada regional (Sukirno, 2000). Belanja pemerintah dalam bentuk pembayaran subsidi kepada berbagai macam golongan masyarakat.

Menurut Hoesada (2016) memaparkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak bisa ditujukan pada masyarakat rumah tangga perindividu. Dalam hal tersebut pengeluaran pemerintah ialah salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah wilayah sehingga tidak dapat ditujukan pada masyarakat perindividu atau rumah tangga karena pada penyelenggaraannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Jadi belanja pemerintah ialaha belanja anggaran dalam menghasilkan aktiva tetap serta aktiva lainnya dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa suatupengeluaran bisa dikategorikan sebagai belanja pemerintah apabila : *Pertama*, belanja tersebut berdampak adanya perolehan aktiva tetap serta aktiva lainnya sehingga menambah aktiva lainnya. *Kedua*, belanja tersebut melebihi batas minimal kapitalis aktiva tetap atau aktiva lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah. *Ketiga*, peroleh aktiva tersebut diniatkan tidak untuk dijual.

Adapun macam-macam pengeluaran yang dapat dibagi kedalam 5 bagian utama aktivitas belanja pemerintah menurut Halim (2012) yang meliputi : *Pertama*, belanja pemerintah tanah. *Kedua*, belanja pemerintah peralatan serta mesin. *Ketiga*, belanja pemerintah gedung serta bangunan. *Keempat*, belanja pemerintah jalan serta irigasi. *Kelima*, belanja pemerintah fisik lainnya. Menurut Sadono (2000) belanja modal ialah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian denga cara menentukan besarnya pendapatan dalam nasional serta APBD untuk wilayah.

Belanja pemerintah seperti pembiayaan subsidi pada berbagai golongan masyarakat. Dalam memberikan kemudahan dalam melaksanakan APBN serta penyusunan laporan keuangan kementerian Negara atau lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman akun penghasilan, pengeluaran pegawai, belanja barang serta belanja kapital sesuai BAS.

2.2.2 Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang bisa melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh barang serta jasa baik dalam memenuhi suatu kebutuhan sendirimaupun pada masyarakat. Menurut Dr. Payaman (dalam Hamzah, 1990) mengatakan bahwa tenaga kerja (*man power*) ialah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melakukan pekerjaan lain. Seperti bersekolah serta ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, ialah angkatan kerja serta bukan angkatan kerja. Pertama, angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas golongan yang bekerja serta golongan yang sedang mencari kerja. Kedua, kelompok yang bukan angkatan kerja yang terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang menurus rumah tangga, serta golongan lainnya.

Menurut BPS tenaga kerja terbagi menjadi 3 bagian. 1. Tenaga kerja penuh ialah tenaga kerja yang mempunyai jam kerja besar dari 35 jam dalam seminggu dengan kinerja tertentu sesuai dengan usia tugas. 2. Tenaga kerja tidak penuh ialah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. 3.

Tenaga kerja yang belum bekerja ialah tenaga kerja dengan jam kerja $0 >$ besar dari 1 jam perminggu.

Salah satu faktor positif yang memicu dalam pertumbuhan ekonomi secara tradisional ialah pertumbuhan penduduknya serta pertumbuhan angkatan kerja (Todaro, 2000). Dalam jumlah tenaga kerja yang paling besar bisa menaikkan tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang palingf besar berarti ukuran pasar domestiknya paling besar pula. Meskipun demikian, masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat bisa membawa efek positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatifnya dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian wilayah tersebut dalam menyerap serta secara produktif menggunakan tenaga kerja yang ada.

Pada model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja dimaknai sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogeny serta tidak terampil dianggap dapat bergerak serta beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dengan jumlah terbatas. Pada kondisi demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi aktivitas sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ialah tenaga kerja.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu dalam melakukan pekerjaan baik yang terdapat didalam

maupun juga diluar hubungan kerja untuk memperoleh barang serta jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tersebut menjadi salah satu panduan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul	Ringkasan
1	Wijayanti, 2002	Analisis Pengaruh PAD, Sumbangan Pemerintah Pusat Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kudus.	Jumlah menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus.
2	Mardiana Aji, 2005	Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 1984-2003	Bahwa total ekspor, investasi, tenaga kerja, dan hutang luar negri secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia
3	Alfarendi Wicaksana, 2017	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 1996-2013	Bahwa investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2.4 Hipotesa

Hipotesa ialah suatu pernyataan yang dipaparkan serta kebenarannya masih lemah. Dari uraian latar belakang, rumusan masalah diatas maka dapat di simpulkan hipotesa sebagai berikut :

1. Di duga pertumbuhan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.
2. Di duga pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar. Dipilihnya kabupaten kampar tersebut karena di Kabupaten Kampar pertumbuhan ekonominya berkembang cukup pesat.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai ialah data sekunder yang berbentuk time series dari tahun 2009-2018. Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah berdasarkan :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar yang meliputi :
 - a. Data Pengeluaran Pemerintah Tahun 2009-2018
 - b. Data Tenaga Kerja Tahun 2009-2018

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian tersebut ialah dengan cara teknik dokumentasi seperti dengan mendatangi langsung instansi yang berkaitan pada objek penelitian tersebut. Penulis juga melakukan wawancara pada pihak instansi terkait, setelah itu pihak instansi tersebut memberikan lembaran data untuk penelitian.

3.4 Devinisi Variabel

Variabel penelitian ialah suatu keadaan yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dalam mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

1. Variabel independen (bebas)

Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini yang merupakan bagian variabel bebasnya yaitu :

a. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (X_1)

Menurut Darise (2008) belanja pemerintah ialah belanja yang dilaksanakan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan pada aktivitas pemerintahan.

b. Pertumbuhan Tenaga Kerja (X_2)

Tenaga kerja ialah permintaan partisipasi tenaga kerja dalam memproduksi barang ataupun jasa atau penduduk yang berusia 15-64 tahun (Subri, 2003).

2. Variabel Dependen (terikat)

Varibel terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini yang dinyatakan variabel terikatnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).

3.5 Analisa Data

Pada penelitian terasebut menggunakan metode statistik untuk kebutuhan estimasi. Pada metode statistik alat yang diperlukan ialah analisis regresi berganda serta menggunakan evIEWS 9.0. Menurut Imam Ghozali (2013) analisis regresi diperlukan dalam mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan bebas.

Analisis regresi berganda ialah hubungan secara liner antar dua variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis tersebut dalam meramal nilai dari variabel terikat jika nilai variabel bebas mengalami peningkatan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing variabel berhubungan positif atau negatif.

Perhitungan regresi linear berganda dapat dihitung sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Kampar (Persen)

b_0 = Konstanta

b_1 - b_2 = Parameter

X_1 = Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (Persen)

X_2 = Pertumbuhan Tenaga Kerja (Persen)

ε = Error

Secara ekonometrika model yang dinilai baik memenuhi semua keadaan ideal suatu model. Secara rinci dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Menurut Imam Ghozali (2013) tujuan dari uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f beranggapan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan grafik normal P-P of *regression standardized residual* dalam menguji normalitas data serta pendekatan uji statistik *Kormogolov-Smirnov*. Dalam pendekatan grafik apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya mengikuti arah garis pola distribusi normal, maka regresi memenuhi anggapan normalitas. Apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi anggapan normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2016) tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Metode yang bisa digunakan untuk menguji terjadinya multikolinearitas bisa dilihat dari matrik korelasi variabel independen. Pada matrik korelasi, apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal tersebut ialah indikasi adanya multikolinearitas. Selain itu juga

bisa dilihat nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance* ialah ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ialah ≥ 10 .

c. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada tahun t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi terjadi disebabkan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan dengan satu sama lainnya. Hal tersebut sering dijumpai dalam data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama dengan tahun berikutnya.

Pada penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Durbin-Waston (DW test) sebagai berikut :

1. Angka DW dibawah -2 yaitu terdapat autokorelasi positif
2. Angka DW diantara -2 sampai +2 yaitu tidak ada autokorelasi
3. Angka DW diatas +2 yaitu terdapat autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan uji Glejser (Gujarati, 2003). Pada uji Glejser nilai residual absolut diregresi dengan variabel bebas. apabila variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka terdapat indikasi heteroskedastisitas .

2. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Menurut Imam Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian dilaksanakan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). penerimaan atau penolakan hipotesis dilaksanakan dengan kriteria :

1. Apabila T probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
 2. Apabila T probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
- b. Uji Statistik F

Menurut Imam Ghozali (2013) uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh anova terhadap variabel dependen.

1. Apabila F probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
 2. Apabila F probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 diperlukan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari X_1 serta X_2 terhadap variasi Y.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar ialah salah satu kabupaten Provinsi Riau, dan Ibukota Kampar terdapat di Bangkinang. Kabupaten tersebut mempunyai luas wilayah 11.289,28 km² atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau dengan jumlah penduduk kurang lebih 851.837 jiwa (sensus penduduk tahun 2018).

Kabupaten Kampar dengan luas kurang lebih 27.908,32 km² ialah wilayah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan serta 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- d. Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan

Seluruh bagian sungai tersebut termasuk kedalam Kabupaten Kampar yang mencakup Kecamatan XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Siak Hulu, serta Kampar Kiri. Sungai besar yang terletak di Kabupaten Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan november serta desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada bulan juli dengan temperatur 35°C Kabupaten Kampar.

4.2 Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, pemerintah wilayah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan daerah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditentukan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dilalui dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar, yang panjangnya kurang lebih 413,5 km dengan keadaan rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar, yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yaitu panjangnya kurang lebih 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintas Kecamatan Tapung. Sungai besar yang terletak di Kabupaten Kampar tersebut sebagian berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik.

Ibukota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 kecamatan, untuk mengetahui jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.1 luas daerah menurut kecamatan di kabupaten kampar, 2018

Nomor	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74
4	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97
5	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59
6	XII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674
8	Kuok	Kuok	151,41
9	Salo	Salo	207,83
10	Tapung	Petapahan	1.365,97
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15
12	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	177,18
14	Bangkinang	Muara Uwai	253,50
15	Kampar	Air Tiris	136,28
16	Kampa	Kampar	173,08
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,95
18	Kampar Utara	Sawah	79,84
19	Tambang	Sungai Pinang	371,94
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54
Kabupaten Kampar		Bangkinang	11.289,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kampar, 2018

Dari tabel 4.1 dapat dipaparkan sebagai berikut. Daerah yang terluas di kabupaten kampar terdapat di kecamatan Tapung dengan ibu kota kecamatan Petapahan seluas 1.365,97 km² sedangkan daerah yang terkecil di kabupaten Kampar terdapat di kecamatan Rumbio jaya dengan ibu kota kecamatan Teratak seluas 76,95 km².

4.3 Penduduk

Penduduk ialah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal didalam daerah dalam waktu cukup lama. Dalam sosiologi, penduduk ialah sekumpulan manusia yang menempati daerah geografi serta ruang tertentu. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 tercatat 851.837 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 436.940 jiwa serta wanita 414.897 jiwa.

Kecamatan yang paling padat penduduknya ialah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, serta Kampar Timur, masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 serta 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya ialah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² serta kampar kiri hilir 13 jiwa/km².

Masalah kependudukan adalah masalah yang paling dirasakan efeknya. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disebabkan semakin banyaknya pendatang dari wilayah lain yang kemudian menetap di Kabupaten Kampar untuk mencari pekerjaan. Salah satu problem yang sering dihadapi oleh negara berkembang ialah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta penyebarannya yang tidak merata. Hal tersebut dikarenakan oleh mobilitas penduduk yang sangat tinggi yang terjadi didaerah tersebut.

Penyebaran penduduk yang tidak merata adalah problem kependudukan. Ketidakmertaan bisa menimbulkan keadaan yang kurang sehat bagi aktivitas

ekonomi. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan penyebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Yang disebut transmigrasi. Pada upaya menaikkan produksi serta pengembangan aktivitas ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja ahli untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang kini mulai pulih setelah mengalami krisis yang berkepanjangan.

4.4 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan serta susunan perangkat wilayah Kabupaten Kampar, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, telah membawa perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun Administrasi Pengelolaan Keuangan, keadaan seperti ini biasa dikenal dengan era otonomi daerah.

Pada era tersebut, wilayah diberi kekuasaan yang lebih dalam menjalankan serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan tujuan yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), selain untuk menghasilkan persaingan yang sehat antar wilayah serta mendorong timbulnya inovasi. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar. Maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang tugas dan jabatan struktural dilingkungan dinas di Kabupaten Kampar yang juga berubah beberapa tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Sejalan dengan perubahan kekuasaan serta penambahan tugas pokok maupun fungsi serta visi misi, target serta sasaran SKPD maka pemerintah wilayah diharapkan lebih mampu menggali sumber khususnya akstensifikasi sumber keuangan dalam memenuhi keperluan pembiayaan pemerintahan serta

pembangunan diwilayahnya serta ditambah dengan peningkatan profesional pengelolaan penghasilan wilayah yang optimal, profesional serta akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan pada wilayah sehingga BAPENDA harus lebih berbenah dari tugas pokok serta fungsi yang diemban.

4.5 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

4.5.1 Visi

Visi ialah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa serta diarahkan agar bisa berkarya secara konsisten serta tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas serta misi pembangunan Kampar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah wilayah perlu menetapkan visi yang selaras dengan kondisi lingkungan serta transisi yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya ialah : “Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal serta Profesional Tahun 2022”.

4.5.2 Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut ialah tantangan bagi seluruh komponen di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka menciptakan visi yang telah ditentukan, melaksanakan tugas pokok serta fungsi, dan kekuasaan yang diamanatkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang

harus diemban, meliputi rumusan/ Pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi serta pihak yang berkepentingan bisa mengetahui serta memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yaitu melalui dua misi sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan Sdm Aparatur Yang Berkualitas.

Misi II : Mengembangkan Dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.

4.6 Perekonomian

Negara Indonesia termasuk dalam peran desentralisasi fiskal dalam mendorong perkembangan ekonomi telah menjadi perhatian banyak negara. Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara efektif sebagai strategi dalam memperlaju pembangunan wilayah. Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut juga telah membawa perubahan besar pada perkembangan penerimaan serta pengeluaran pemerintah kabupaten Kampar.

Laju pertumbuhan ekonomi ialah suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Tabel 4.2 : Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2009	2,56
2010	3,54
2011	3,25
2012	6,16
2013	4,52
2014	3,42
2015	2,41
2016	2,03
2017	4,98
2018	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan dari tabel 4.2 bisa ditinjau bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi. Yang mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar pada tahun 2009 sebesar 2,56 persen dan di tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 3,09 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,16 persen dan pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,03 persen.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar

Menurut Sukirno (2000) belanja modal ialah suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pendapatan serta belanja pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah atau regional. Dalam menggerakkan serta memajukan penghasilan wilayah, pemerintah Kampar berkewajiban untuk memanfaatkan dana yang ada sumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) dengan semaksimal serta seefisien mungkin.

Tabel 5.1 : Perkembangan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018.

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Persen)	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
2009	94,31	1.250.016.940
2010	94,50	1.765.445.320
2011	94,54	2.545.239.789
2012	98,44	1.753.996.299
2013	92,56	2.972.958.920
2014	90,80	1.583.496.799
2015	90,60	2.543.965.911
2016	92,57	2.457.987.765
2017	94,54	1.356.698.458
2018	94,35	2.221.556.228

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009-2012 pertumbuhan belanja pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan

94,31-98,44%. Pada tahun 2013-2015 pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami penurunan 92,56-90,60%. Sedangkan pada tahun 2016-2017 pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan kembali dari 92,57-94,54%. Dan pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah Kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 94,35%.

5.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Di kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di kabupaten Kampar. Selain pertambahan jumlah penduduk, jumlah pengangguran terdidik tentunya juga akan mengalami peningkatan di kabupaten Kampar. Seiring dengan bertambahnya jumlah lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Tuanku Tambusai serta Sekolah Tinggi Ekonomi Bangkinang yang melepas ratusan wisudawan/i setiap periode wisuda.

Problem pengangguran yang terjadi di kabupaten Kampar bukan hanya dikarenakan oleh kesenjangan antara pencari kerja serta kesempatan kerja yang tersedia, tetapi pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kerja tidak termanfaatkan dengan baik.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Dr. Payaman (dalam Hamzah, 1990) menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (*man power*) yaitu produk yang sudah atau

sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah dan ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertama, angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang sedang mencari kerja. Kedua, kelompok yang bukan angkatan kerja yang terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang menurus rumah tangga, dan golongan lain-lain.

Tabel 5.2 : Perkembangan Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Kabupaten Kampar Tahun 2009-2018.

Tahun	Tenaga Kerja (Persen)	Tenaga Kerja (Orang)
2009	61,82	327.569
2010	60,30	310.978
2011	62,25	324.753
2012	60,46	367.453
2013	63,63	306.345
2014	62,78	328.545
2015	61,44	320.491
2016	60,34	330.673
2017	61,16	348.846
2018	60,45	372.775

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 banyaknya banyaknya tenaga kerja di kabupaten Kampar sebesar 61,82 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 60,30 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan tenaga kerja

dikabupaten kampar mengalami peningkatan sebesar 62,25 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 60,46 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 63,63 persen. Pada tahun 2014-2016 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 62,78-60,34 persen. Dan pada tahun 2017 pertumbuhan tenaga kerja di kabupate Kampar mengalami peningkatan kembali sebesar 61,16 persen. Dan pada tahun 2018 pertumbuhan tenaga kerja di kabupaten Kampar mengalami penurunan kembali sebesar 60,45 persen.

5.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat digunakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (Sadono Sukirno,2005) Menurut BPS besarnya struktur ekonomi serta peran sektor ekonomi dapat ditunjukkan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasarharga berlaku. Ada tiga macam pendekatan dalam menghitung angka PDRB yang dapat digunakan dalam penelitian. 1). Dari sisi pendapatan. Suatu nilai tambah pada setiap aktivitas ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, seperti upah, surplus usaha, serta pajak tidak langsung neto. Dalam sektor pemerintahan pada upaya yang bersifat tidak mencari profit, keuntungan usaha tidak dihitung. Keuntungan usaha mencakup bunga yang dibayarkan neto, serta sewa tanah. Teknik yang seperti ini banyak digunakan dalam sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara dengan harga pasar, contohnya pada sektor pemerintahan. Hal

ersebut dikarenakan tidak adanya metode yang akurat serta kurang lengkapnya data yang bisa digunakan untuk mengukur nilai produksi serta biaya antara pada aktivitas jasa biaya (Robinson Tarigan, 2005). 2) dari sisi pengeluaran. Dalam sisi pengeluaran ini dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai pengguna akhir pada barang serta jasa yang diproduksi dalam negeri. Apabila ditinjau pada sisi penggunaan maka total penyediaan barang serta jasa dapat dipakai pada konsumsi rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, serta akumulasi modal. 3). Dari sisi produksi. Pendekatan produksi ini dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah dari barang serta jasa yang diproduksi pada suatu aktivitas ekonomi wilayah dikurangi oleh biaya antara masing-masing total produksi bruto setiap aktivitas subsektor pada dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Jhingan (2004) Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan terus menerus dalam produk perkapita atau perpekerja, sering kali diikuti kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural. Ada kecenderungan yang dapat dilihat sebagai hipotesis bahwa semakin laju pertumbuhan ekonomi maka semakin pula perubahan struktur ekonomi, dengan anggapan bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja.

Tabel 5.3 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018.

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (Persen)	PDRB (Juta Rupiah)
2009	2,56	36.456.045
2010	3,54	37.822.020
2011	3,25	39.378.306
2012	6,16	41.668.547
2013	4,52	44.297.583
2014	3,42	45.816.466
2015	2,41	46.314.067
2016	2,03	47.609.044
2017	4,98	49.039.756
2018	3,09	49.971.916

Sumber : Badan Pusat Statistik Kampar, 2019

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi. Yang mana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar pada tahun 2009 sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar mengalami penurunan sebesar 3,25 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurunn sebesar 4,52 persen. Pada tahun 2014-2016 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 3,42-2,03 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar mengalmi peningkatan kembali sebesar 4,98

persen. Dan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 3,09 persen.

5.2 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kampar

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/02/20 Time: 02:41
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-70.06623	29.01093	-2.415167	0.0464
X1	0.477837	0.158136	3.021690	0.0193
X2	0.469858	0.310390	1.513766	0.1739
R-squared	0.566665	Mean dependent var		3.596000
Adjusted R-squared	0.442855	S.D. dependent var		1.277386
S.E. of regression	0.953469	Akaike info criterion		2.985905
Sum squared resid	6.363719	Schwarz criterion		3.076680
Log likelihood	-11.92952	Hannan-Quinn criter.		2.886324
F-statistic	4.576887	Durbin-Watson stat		2.085034
Prob(F-statistic)	0.053565			

dari hasil estimasi di atas maka didapat fungsi persamaan sebagai berikut :

$$Y = -70,0662 + 0,4778X_1 + 0,4698X_2$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dua variabel bebas (Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Tenaga Kerja) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi). Dari variabel pertumbuhan pengeluaran pemerintah (X_1) dan pertumbuhan tenaga kerja (X_2) ini, ada yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Kampar. Dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di

Kabupaten Kampar. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja secara rinci.

5.2.1 Interpretasi Hasil

1. Koefisien Regresi

Berdasarkan dari hasil persamaan tersebut ialah pertumbuhan pengeluaran pemerintah (X_1) serta pertumbuhan tenaga kerja (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar dengan hasil analisis regresi yaitu :

- a. Konstanta b_0 -70,0662 yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar apabila pertumbuhan pengeluaran pemerintah serta pertumbuhan tenaga kerja sama dengan 0 adalah sebesar -70,0662 persen.
- b. Nilai koefisien b_1 adalah sebesar 0,4778. Berdasarkan uji parsial yang artinya pertumbuhan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Yang artinya setiap kenaikan pertumbuhan pengeluaran pemerintah 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4778 persen.
- c. Nilai koefisien b_2 adalah sebesar 0,4698. Berdasarkan uji parsial bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama masalah ketenagakerjaan, karena kemampuan negara yang sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas.

5.3 Uji Statistik

1. Uji Parsial

Menurut Imam Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

Apabila T probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila T probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

- a. Pengujian pertumbuhan pengeluaran pemerintah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai t probabilitas untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar $0,0193 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya pertumbuhan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.

- b. Pengujian pertumbuhan tenaga kerja (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kabupaten kampar.

Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai t probabilitas untuk pertumbuhan tenaga kerja sebesar $0,1739 > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya pertumbuhan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar.

2. Uji Statistik F (Bersama-Sama)

Menurut Imam Ghozali (2013) uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel terikat.

Apabila $F_{\text{probabilitas}} > 0,05$ maka H_0 diterima.

Apabila $F_{\text{probabilitas}} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil uji f (bersama-sama) dapat diketahui bahwa uji f probabilitas sebesar $0,053565 = \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari X_1 dan X_2 terhadap variasi Y . Koefisien determinasi menetapkan pada kemampuan dari variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y). Koefisien determinasi dipakai dalam menghitung seberapa besar variabel terikat bisa dipaparkan oleh varian variabel bebas. Nilai dari R^2 paling besar 1 dan paling kecil 0 ($0 < R^2 < 1$). Jika $R^2 = 0$ maka garis regresi tidak bisa dipakai dalam membuat ramalan variabel terikat, karena variabel yang dimasukkan kedalam persamaan regresi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 0.

Dari hasil regresi diketahui nilai R^2 sebesar 0,566665. Hal ini berarti besarnya kontribusi dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan tenaga kerja terhadap variasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten kampar adalah

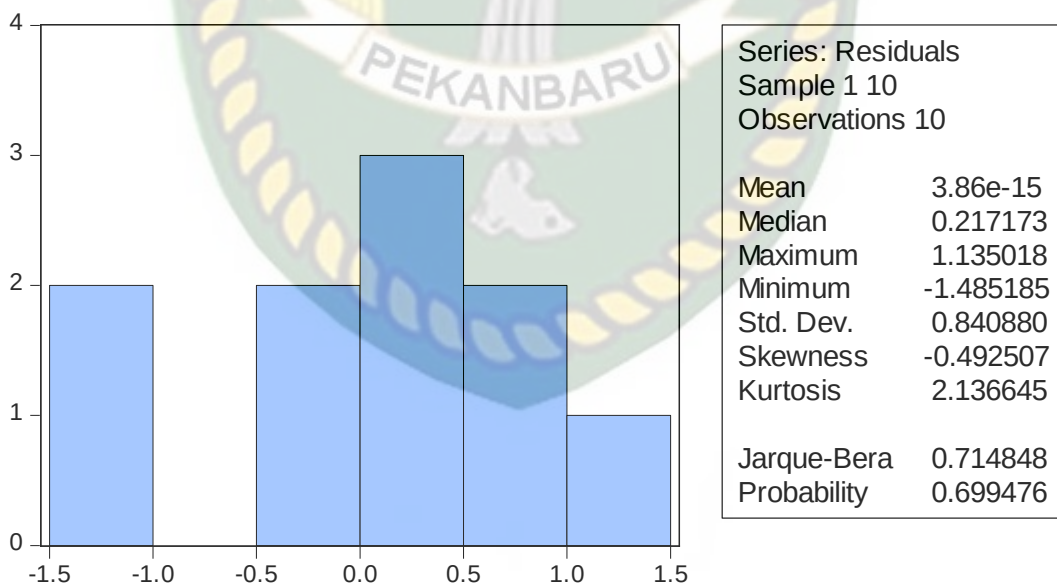
56%. Sedangkan sisanya 44% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi.

5.4 Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari grafik histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan uji Jarque-Bera.

Berikut grafik normalitas :



Dari hasil estimasi regresi tersebut, terlihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka keempat variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji

Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,714848 dan nilai Chi-Square adalah 7,815. Nilai JB lebih kecil dari Chi-Square yang model regresi tersebut mempunyai distribusi yang normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser (Gujarati, 2003). Pada uji Glejser nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat dari nilai Chi Square (Obs*R-Squared) serta nilai kritis Chi-Square dengan ketentuan sebagai berikut : jika nilai Chi-Square lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Berikut grafik uji heteroskedastisitas :

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.965672	Prob. F(2,7)	0.4262
Obs*R-squared	2.162434	Prob. Chi-Square(2)	0.3392
Scaled explained SS	0.602190	Prob. Chi-Square(2)	0.7400

Berdasarkan dari hasil pengolahan data diatas, maka dapat diketahui nilai Obs*R-Square adalah 0,3392 sedangkan nilai kritis chi-square adalah 7,815 maka dapat dilihat dari Obs*R-Square lebih kecil dari nilai kritis chi-square yang artinya model regresi tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar pertumbuhan belanja pemerintahan serta pertumbuhan tenaga kerja. jika pertumbuhan belanja pemerintah serta pertumbuhan tenaga kerja terdapat korelasi, maka hal ini tidak orthogonal. Dikatakan orthogonal, apabila nilai korelasi antar pertumbuhan belanja pemerintah dan pertumbuhan tenaga kerja sama dengan nol. Pengujian tersebut dilakukan dengan melihat nilai VIF dengan ketentuan sebagai berikut : apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak ditemukan adanya model multikolinearitas, dan apabila nilai $VIF > 10$ maka model ini ditemukan adanya multikolinearitas. Berikut grafik uji multikolinearitas :

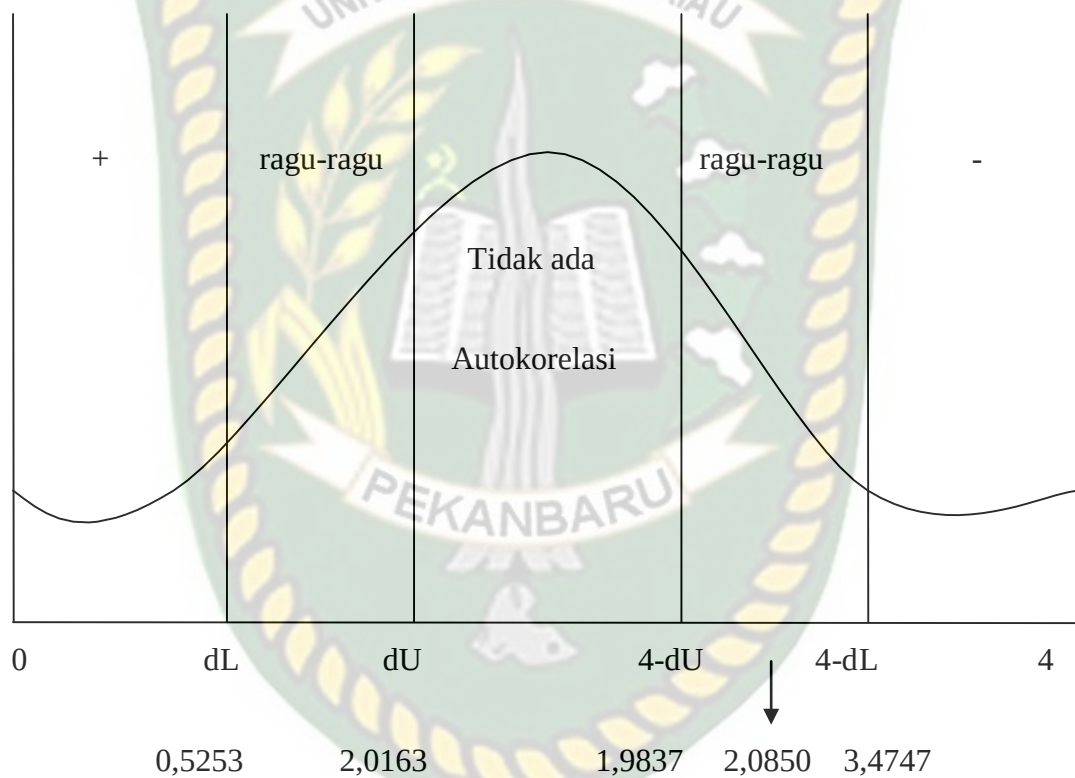
Variance Inflation Factors
Date: 07/02/20 Time: 02:43
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	841.6339	9257.852	NA
X1	0.025007	2417.395	1.262733
X2	0.096342	4004.672	1.262733

Dari hasil olahan data diatas dapat dilihat bahwa kedua variabel bebas tersebut nilai VIF lebih kecil dari 10 maknanya variabel pertumbuhan belanja pemerintah serta pertumbuhan tenaga kerja tidak terkena multikolinearitas. Hal itu berarti antar pertumbuhan belanja pemerintah dan tenaga kerja tidak mempunyai hubungan linear dalam model regresi.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Pada regresi yang baik ialah regresi yang tidak terkena autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi tersebut menggunakan uji D-W. Berikut gambar uji autokorelasi :



Dari hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai D-W yaitu sebesar 2,0850. apabila dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut terletak sebelum 2 sampai 4-dL dan berada pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Hal ini berarti dalam model regresi linear tersebut terdapat autokorelasi atau tidak ada autokorelasi.

5.5 Pembahasan

5.5.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pengeluaran pemerintah ada pengaruh positif serta signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Hal tersebut disesuaikan dengan penelitian yang sama dengan Deddy rustiono (2008) yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Bedanya dengan penelitian tersebut ialah penelitian tersebut tidak memasukkan variabel investasi. Dalam konsep ekonomi makro belanja pemerintah dapat meningkatkan perekonomian nasional. Jadi apabila belanja pemerintah meningkat maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Dalam model makro ekonomi yang dikembangkan oleh Keynes, kenaikan PDB dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi, investasi, belanja pemerintah serta net ekspor. Peningkatan pengeluaran pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah seluruh belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan mempengaruhi konsumsi yang terjadi di masyarakat. Selain itu pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan aupun pendidikan juga mempengaruhi peningkatan produktivitas yang berdampak pada peningkatan output produksi, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

5.5.2 Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak ada pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Hal tersebut disesuaikan dengan penelitian Dwi Suryanto dan Dedi Rustiono (2011) yang berjudul Pengaruh penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dari hasil penelitian diperoleh secara parsial tahun 2012-2017 di dapat nilai signifikasi untuk variabel X (penyerapan tenaga kerja) sebesar 0,357 ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau $0,0357 > \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifiansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga variabel penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bedanya dengan penelitian tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Dwi suryanto dan Deddy Rustiono iini hanya membahas satu variabel yaitu tenaga kerja. Sedangkan penelitian tersebut dua variabel yaitu pertumbuhan pengeluaran pemerintah serta pertumbuhan tenaga kerja.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Adam smith yang memandangpekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang mengatakan pertumbuhan ekonomi (diwilayah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor produksi yaiut : kapital, sumber daya manusia serta teknologi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suryanto dan Deddy Rustiono yang mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah sumber daya manusia

yang lebih tinggi berarti akan membahas tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi berarti ukuran domestiknya lebih tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah ada pengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar dengan nilai koefisiennya ialah 0,477837. Hal tersebut pertumbuhan belanja pemerintah dicerminkan oleh jumlah pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung sehingga berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan tenaga kerja tidak ada pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar dengan nilai koefisiennya ialah 0,469858. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi bisa menimbulkan berbagai masalah serta hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama problem ketenagakerjaan, karena kemampuan negara yang sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas.

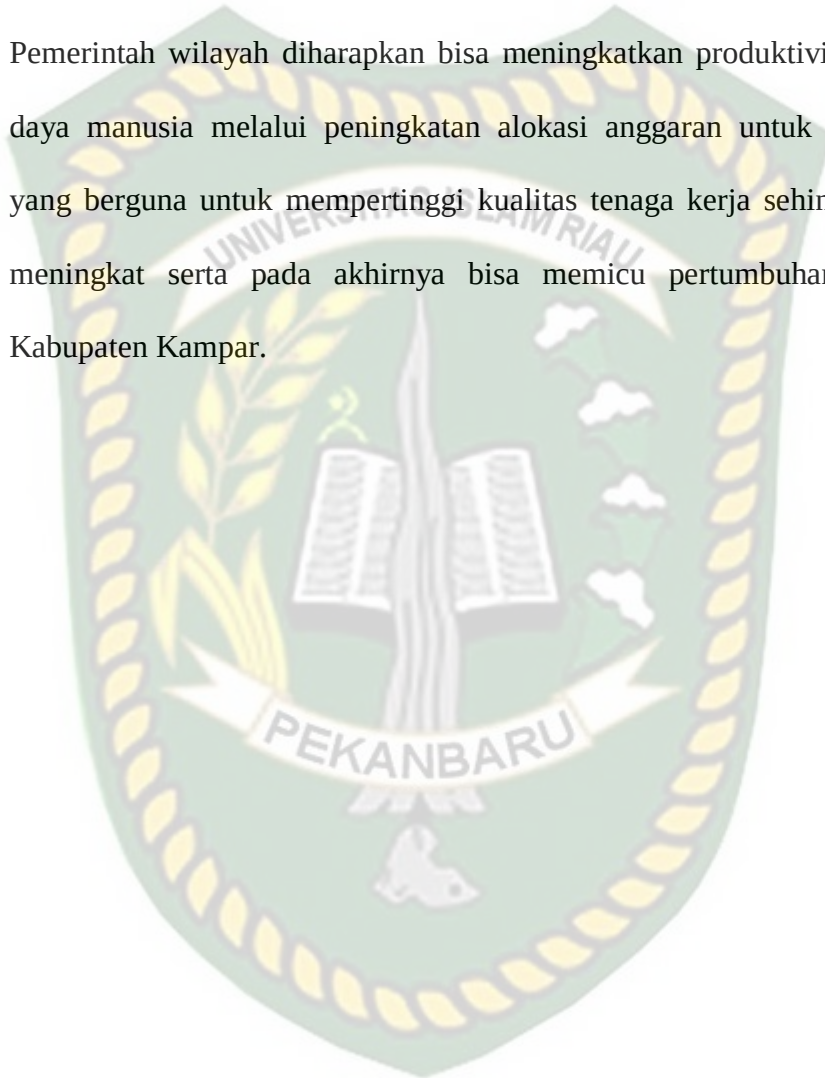
6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dapat dipaparkan melalui saran oleh peneliti pada penelitian tersebut, yaitu :

1. Pemerintah wilayah Kabupaten Kampar diharapkan bisa mengaplikasikan belanja daerah secara profesional antar pengeluaran rutin dengan

pengeluaran pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Kampar.

2. Pemerintah wilayah diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan yang berguna untuk mempertinggi kualitas tenaga kerja sehingga output meningkat serta pada akhirnya bisa memicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husain at-Tariqi. 2004. Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Terj. Oleh M. Irfan Syohhwani, Magistra Insania Press: Yogyakarta.
- Abdul Halim dkk. 2012. Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Andi Hamza. 1990. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Erlina, Rasdiantoro. 2013. Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual. Penerbit Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akutansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. ANDI. Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyadi, Subri. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mursyidi. 2013. Akutansi Pemerintahan Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rustiadi, E dan E. Dardak. 2008. Agropolitan: Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Perdesaan. Bogor: Crespent Press.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, Sadono. 2005. Makro Ekonomi Teori. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro. 2000. *Economic Development, Seven Edition, New York, Addition Wesley Longman.Inc.*
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PERDA)
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.